

PERILAKU PETUGAS PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI : SEBUAH ANALISIS DENGAN PENDEKATAN TEORI TRANSTHEORETICAL MODEL (*MODEL STAGES OF CHANGE*)

Darman^{1*}, Eko Winarti²

Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Kadiri^{1,2}

*Corresponding Author : darman_asmat@yahoo.com

ABSTRAK

Akreditasi menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas, namun, implementasinya seringkali dihadapi oleh berbagai tantangan, salah satunya adalah perubahan perilaku petugas Puskesmas. Pemahaman mendalam mengenai tahapan perubahan perilaku menjadi krusial, mengingat bahwa perubahan tersebut dapat menjadi faktor penentu dalam suksesnya proses akreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan terkait perilaku petugas Puskesmas dalam konteks pelaksanaan akreditasi, dengan fokus pada pemahaman dan analisis menggunakan Teori Transtheoretical Model. Telaah literatur ini akan dilakukan dengan menggunakan metode PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Pentingnya komunikasi efektif, pembentukan tim kerja solid, dan pendekatan berkelanjutan untuk intervensi menjadi penekanan kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi akreditasi di Puskesmas. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan petugas dan memfasilitasi akses terhadap informasi dan pelatihan. Puncak perubahan perilaku terjadi pada tahap Aksi, di mana petugas benar-benar terlibat dalam proses akreditasi. Artikel jurnal memainkan peran kunci dalam memberikan panduan praktis dan inspirasi melalui studi kasus. Tahap Pemeliharaan menjadi tantangan selanjutnya, di mana artikel jurnal tentang keberlanjutan implementasi memberikan landasan untuk menjaga momentum positif. Secara keseluruhan, integrasi TTM dengan literatur dari artikel jurnal memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana partisipasi petugas Puskesmas dalam proses akreditasi dapat meningkatkan mutu layanan kesehatan. Melalui pemahaman ini, kita dapat mengarahkan upaya menuju sistem kesehatan yang lebih berkualitas, sesuai dengan tujuan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci : akreditasi, perilaku, Teori *Transtheoretical Model*

ABSTRACT

Accreditation is an integral part of efforts to improve the quality of health services at Community Health Centers, however, its implementation is often faced with various challenges, one of which is changes in the behavior of Community Health Center staff. This research aims to fill the knowledge gap regarding the behavior of Community Health Center officers in the context of implementing accreditation, with a focus on understanding and analysis using the Transtheoretical Model Theory. This literature review will be carried out using the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) method. The importance of effective communication, forming a solid work team, and a sustainable approach to intervention are key emphasis in ensuring the successful implementation of accreditation at Community Health Centers. Information technology can also be utilized to increase officer involvement and facilitate access to information and training. The peak of behavior change occurs at the Action stage, where officers are actually involved in the accreditation process. Journal articles play a key role in providing practical guidance and inspiration through case studies. The Maintenance Phase is the next challenge, where journal articles on implementation sustainability provide a foundation for maintaining positive momentum. Overall, the integration of TTM with literature from journal articles provides in-depth insight into how the participation of Community Health Center staff in the accreditation process can improve the quality of health services. Through this understanding, we can direct efforts towards a higher quality health system, in line with government goals and community needs.

Keywords : accreditation, behavior, *Transtheoretical Model Theory*

PENDAHULUAN

Akreditasi menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas, namun, implementasinya seringkali dihadapi oleh berbagai tantangan, salah satunya adalah perubahan perilaku petugas Puskesmas. Pemahaman mendalam mengenai tahapan perubahan perilaku menjadi krusial, mengingat bahwa perubahan tersebut dapat menjadi faktor penentu dalam suksesnya proses akreditasi.

Proses akreditasi memegang peran sentral dalam menjamin kualitas layanan kesehatan di tingkat Puskesmas. Namun, untuk mencapai kesuksesan dalam implementasinya, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari petugas Puskesmas. Tantangan yang dihadapi oleh petugas Puskesmas dalam menghadapi akreditasi dapat meliputi resistensi terhadap perubahan, ketidakpahaman terhadap manfaat akreditasi, dan beban kerja tambahan yang mungkin timbul akibat penyesuaian dengan standar akreditasi. Oleh karena itu, perlu pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku petugas Puskesmas dalam menghadapi proses akreditasi.

Teori Transtheoretical Model (Stages of Change) muncul sebagai kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis perubahan perilaku petugas Puskesmas. Model ini mengidentifikasi tahapan perubahan perilaku, mulai dari tahap prakontemplasi hingga tahap aksi dan pemeliharaan. Penerapan model ini dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai tahapan di mana petugas Puskesmas berada dalam proses menghadapi perubahan terkait akreditasi, dan juga memberikan dasar untuk merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan di setiap tahapan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi aspek-aspek tertentu dalam hubungan antara perilaku petugas Puskesmas dan akreditasi, tetapi masih diperlukan penyelidikan lebih lanjut yang lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita mengenai dinamika perilaku petugas Puskesmas dalam pelaksanaan akreditasi, sekaligus memberikan dasar empiris untuk pengembangan kebijakan dan strategi intervensi yang lebih efektif. Kesimpulannya, pemahaman yang lebih baik tentang peran transtheoretical model dalam konteks perilaku petugas Puskesmas dapat membuka jalan menuju pelayanan kesehatan primer yang lebih berkualitas dan sesuai dengan standar akreditasi.

Perilaku petugas Puskesmas dalam pelaksanaan akreditasi tidak hanya mencakup aspek individual, tetapi juga terkait dengan konteks organisasi dan sistem kesehatan. Resistensi terhadap perubahan mungkin muncul karena ketidakpastian mengenai bagaimana implementasi akreditasi akan memengaruhi pekerjaan sehari-hari mereka. Beban kerja yang lebih tinggi dan tuntutan untuk memenuhi standar yang lebih ketat dapat menjadi hambatan dalam perubahan perilaku yang diperlukan.

Adapun Teori Transtheoretical Model memberikan perspektif dinamis mengenai tahapan perubahan perilaku, memandangnya sebagai proses yang berkelanjutan dan dapat berubah seiring waktu. Dalam konteks ini, pemahaman tahapan ini dapat membantu merinci strategi intervensi yang lebih spesifik untuk setiap tahapan perubahan, seperti meningkatkan kesadaran, memberikan pelatihan, atau memberikan dukungan psikososial.

Tantangan praktis yang dihadapi petugas Puskesmas dalam pelaksanaan akreditasi membutuhkan solusi yang dapat diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku petugas Puskesmas, tetapi juga mencari solusi atau rekomendasi yang dapat meningkatkan partisipasi dan komitmen mereka dalam menghadapi akreditasi.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap perilaku petugas Puskesmas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan signifikan untuk peningkatan implementasi akreditasi di Puskesmas. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan

landasan untuk penyusunan kebijakan dan strategi manajemen yang lebih efektif dalam memfasilitasi perubahan perilaku yang diinginkan.

Dengan merangkum latar belakang masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan terkait perilaku petugas Puskesmas dalam konteks pelaksanaan akreditasi, dengan fokus pada pemahaman dan analisis menggunakan Teori Transtheoretical Model. Kesimpulannya, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang dinamika perilaku petugas Puskesmas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer dan mencapai tujuan akreditasi yang diinginkan.

METODE

Penulisan ini bertujuan untuk melakukan telaah literatur sistematis (*systematic literature review*). Telaah literatur ini akan dilakukan dengan menggunakan metode PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*).

Identifikasi. Identifikasi pertama dilakukan dengan merumuskan pertanyaan penelitian secara jelas dan spesifik terkait dampak akreditasi Puskesmas terhadap kualitas layanan kesehatan primer. Pengembangan strategi pencarian literatur yang komprehensif dan sistematis untuk mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang relevan. Pemilihan basis data dan sumber informasi yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi terkait.

Seleksi. Penyaringan awal berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Misalnya, hanya literatur yang berkaitan langsung dengan dampak akreditasi Puskesmas pada kualitas layanan primer yang diikutsertakan. Proses seleksi literatur dilakukan secara independen oleh dua atau lebih peneliti untuk memastikan konsistensi dan validitas pemilihan.

Evaluasi. Penilaian kualitas dan relevansi literatur dilakukan secara cermat dengan menggunakan kriteria penilaian tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.. Pengumpulan data mengenai karakteristik dan temuan dari setiap artikel, termasuk metode penelitian, sampel, dan hasil utama.

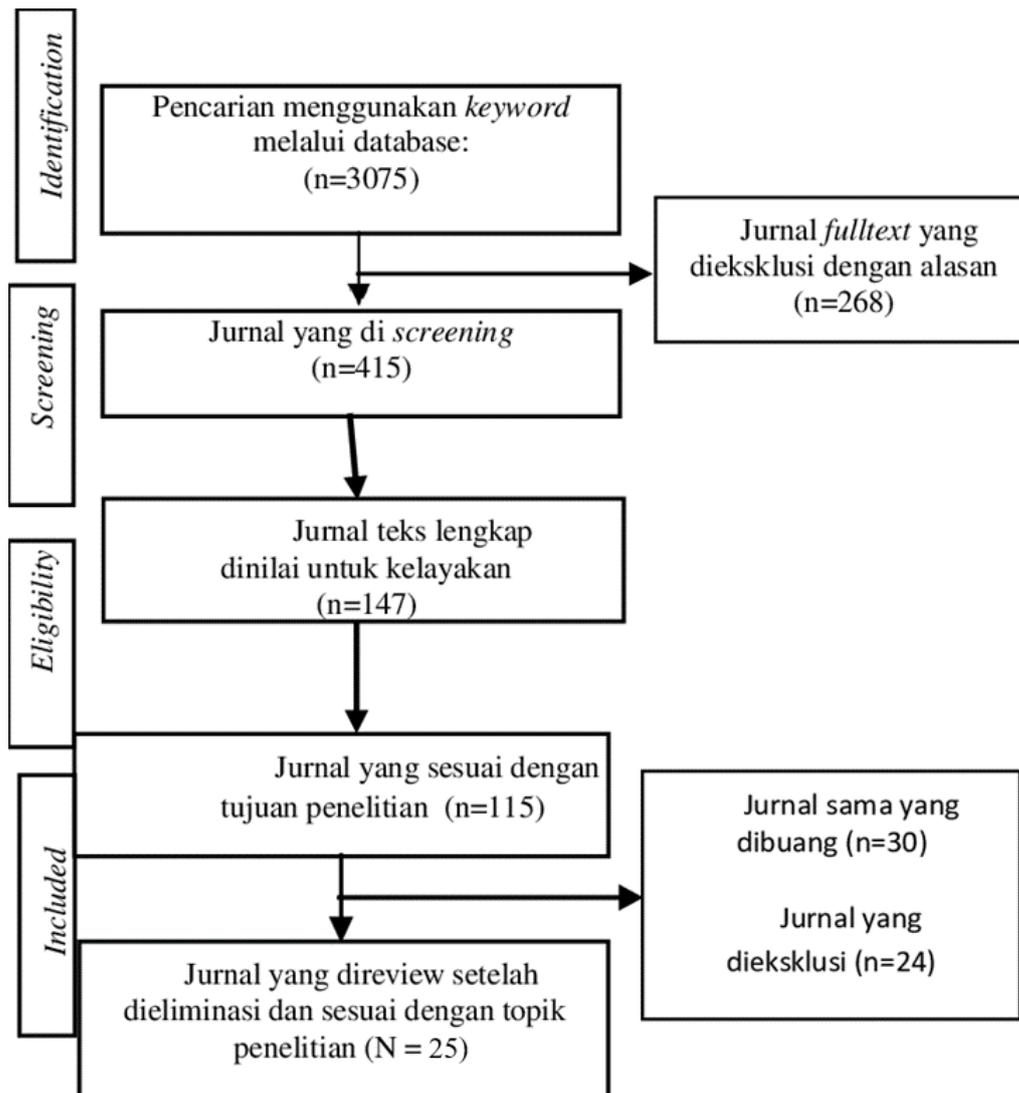
Inklusi. Menyusun daftar literatur yang lolos seleksi dan memenuhi kriteria inklusi. Pengecekan ulang terhadap literatur yang akan diikutsertakan untuk memastikan konsistensi dengan pertanyaan penelitian.

Ekstraksi Data. Pengambilan data yang relevan dari setiap artikel termasuk informasi mengenai desain penelitian, populasi studi, hasil, dan temuan utama. Menerapkan kaidah-kaidah PRISMA dalam ekstraksi data untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Analisis. Analisis temuan literatur dilakukan secara sistematis, termasuk pembahasan perbedaan dan persamaan antara studi-studi yang diikutsertakan. Penerapan metode meta-analisis jika diperlukan, untuk menggabungkan dan menyintesis temuan-temuan dari studi-studi yang berbeda.

Presentasi. Menyajikan temuan secara jelas dan komprehensif dengan mengikuti struktur PRISMA, termasuk pembuatan flow diagram untuk memvisualisasikan proses seleksi literatur. Menyusun dan menyajikan data dengan format tabel atau grafik jika diperlukan.

Kesimpulan. Merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dalam telaah literatur. Memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau implikasi kebijakan.



Gambar 1. Prisma Study Flow Diagram

HASIL

Berdasarkan hasil tahapan kajian literatur yang telah dilakukan, maka berikut ini 25 review yang dari artikel yang telah dipilih:

Tabel 1. Hasil Review

No.	Identitas Artikel Jurnal	Review
1	Syukriadi, S. (2022). Upaya Meningkatkan Capaian Akreditasi Puskesmas Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu. <i>Jkm (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama</i> , 10(1), 145-157.	Artikel ini membahas upaya Dinas Kesehatan Rokan Hulu dalam meningkatkan capaian akreditasi Puskesmas di wilayahnya. Dengan pendekatan kualitatif dan desain Rapid Assessment Procedure, penelitian ini menyoroti masalah prioritas, penyebab dominan, dan alternatif pemecahan masalah terkait dengan akreditasi Puskesmas. Ditemukan bahwa masalah prioritas adalah terdapat banyak Puskesmas yang masih berada pada tingkat akreditasi dasar. Penyebab dominan masalah diidentifikasi sebagai manajemen waktu yang sulit untuk pembinaan dan pengawasan. Sebagai alternatif pemecahan, artikel merekomendasikan penyusunan jadwal pembinaan dan pengawasan yang terjadwal untuk mendukung proses akreditasi. Artikel ini memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan Rokan Hulu dalam meningkatkan capaian akreditasi

-
- Puskesmas, dengan fokus pada aspek manajemen waktu. Untuk memahami lebih lanjut tentang dampak akreditasi terhadap kualitas layanan, perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut pada isi artikel.
-
- 2 Eviheryanto, E., & Syakurah, R. A. (2023). Workshop Instrumen Akreditasi Puskesmas Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 5(1), 184-192.
- Artikel ini membahas kegiatan workshop instrumen akreditasi Puskesmas yang diadakan oleh Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. Dengan melibatkan 45 peserta, workshop bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di wilayahnya. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan manajemen proyek, membahas pemahaman instrumen akreditasi Puskesmas pada petugas Puskesmas.
- Kegiatan workshop dilaksanakan di Hotel PIA Kota Pangkalpinang pada bulan Maret hingga April 2020, dengan melibatkan tahap inisiasi, perencanaan, implementasi, monitoring, supervisi, evaluasi, dan pelaporan. Meskipun kegiatan berjalan lancar, artikel mencatat beberapa kendala, termasuk kurangnya koordinasi antar tim kerja dan kurangnya aktifitas peserta. Hasil kegiatan ini diolah dalam bentuk narasi untuk memberikan gambaran pelaksanaan workshop.
- Artikel ini memberikan pemahaman tentang pendekatan manajemen proyek dalam pelaksanaan workshop instrumen akreditasi Puskesmas, namun juga mengakui beberapa kendala yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas kegiatan di masa mendatang.
-
- 3 Hidayat, A. W., Setianingsih, L. E., & Hutagaol, E. K. (2023). Workshop Persiapan Akreditasi Di Klinik Pratama Mitra Sehat KD. Waringin Tahun 2022. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 1991-1998.
- Artikel penelitian berjudul "Workshop Persiapan Akreditasi Di Klinik Pratama Mitra Sehat KD. Waringin Tahun 2022" menggambarkan upaya peningkatan persiapan akreditasi di Klinik Mitra Sehat KD. Waringin. Penelitian ini dilakukan oleh Afif Wahyudi Hidayat, Lyliana Endang Setianingsih, dan Emmelia Kristina Hutagaol dari Universitas Medika Suherman, Bekasi, Indonesia.
- Dalam konteks pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, artikel ini secara implisit membahas tahapan perubahan perilaku petugas klinik dalam menghadapi proses akreditasi. Terutama, fokusnya adalah pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman petugas klinik tentang pengelolaan data, penyusunan dokumen akreditasi, tata naskah penulisan dokumen, dan pengendalian dokumen. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan Teori Transtheoretical Model, namun peningkatan pengetahuan yang dicapai melalui workshop persiapan akreditasi dapat diartikan sebagai sebuah tahapan perubahan perilaku. Faktor-faktor yang menjadi hambatan atau pendukung bagi perubahan perilaku petugas klinik tidak diuraikan secara rinci dalam abstrak. Namun, dapat diasumsikan bahwa faktor pendukung melibatkan pemberian workshop, partisipasi aktif dari pemilik klinik, pimpinan, pegawai administrasi, dan tenaga medis dalam kegiatan persiapan akreditasi. Faktor hambatan potensial mungkin termasuk resistensi terhadap perubahan atau ketidakpahaman awal terkait tata kelola dokumen.
- Dalam kaitannya dengan strategi intervensi, artikel ini menyajikan workshop sebagai metode untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas klinik. Workshop ini dapat dianggap sebagai intervensi yang disesuaikan dengan tahapan perubahan perilaku, membantu petugas klinik untuk memahami dan mengimplementasikan praktik-praktik yang mendukung persiapan akreditasi.
- Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran tentang upaya persiapan akreditasi di Klinik Mitra Sehat KD. Waringin, meskipun tidak secara eksplisit membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Keseluruhan penelitian ini dapat memberikan pandangan terhadap dinamika perubahan perilaku petugas klinik dalam menghadapi akreditasi, terutama dalam konteks tata kelola dokumen.
-
- 4 Trisna, I. N. P., & Raharjo, B. B. (2019). Status akreditasi puskesmas dengan tingkat kepuasan pasien. *HIGEIA*
- Artikel berjudul "Status Akreditasi Puskesmas dengan Tingkat Kepuasan Pasien" yang ditulis oleh Intan Nurjannah Pratiwi Trisna dan Bambang Budi Raharjo dari Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia,
-

<i>(Journal of Public Health Research and Development)</i> , 3(2), 324-336.	<p>membahas hubungan antara status akreditasi Puskesmas dan tingkat kepuasan pasien.</p> <p>Dalam penelitian ini, penulis ingin menyelidiki hubungan antara status akreditasi Puskesmas dengan tingkat kepuasan pasien, khususnya di lima Puskesmas di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan desain cross-sectional. Sampel penelitian terdiri dari 101 responden yang dipilih dengan teknik proporsional simple random sampling. Instrumen yang digunakan mencakup kuesioner terstruktur dan lembar observasi, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan uji chi-square dan uji regresi logistik.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status akreditasi Puskesmas dan tingkat kepuasan pasien. Kategori status akreditasi, seperti non-accredited, basic accredited, dan middle accredited, diidentifikasi memiliki hubungan dengan tingkat kepuasan pasien. Setelah dikontrol oleh variabel-variabel seperti pendidikan, pendapatan, status pekerjaan, dan jenis pembiayaan, hanya kategori non-accredited dan basic accredited yang masih terkait dengan kepuasan pasien.</p> <p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa status akreditasi Puskesmas, terutama dalam kategori non-accredited dan basic accredited, memiliki keterkaitan dengan tingkat kepuasan pasien. Meskipun artikel ini tidak secara langsung membahas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Teori Transtheoretical Model atau strategi intervensi, namun hasilnya memberikan pandangan terhadap bagaimana status akreditasi dapat memengaruhi kepuasan pasien di lingkungan Puskesmas.</p>
5 Ensha, I. S. (2018). Pengaruh implementasi kebijakan akreditasi puskesmas terhadap manajemen pelayanan kesehatan masyarakat dalam mewujudkan produktivitas kerja. <i>Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara</i> , 12(01), 12-23.	<p>Artikel yang berjudul "Pengaruh Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas terhadap Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mewujudkan Produktivitas Kerja" oleh Ira Susanti Ensha membahas dampak implementasi kebijakan akreditasi Puskesmas terhadap manajemen pelayanan kesehatan masyarakat dan produktivitas kerja pegawai di UPT Puskesmas Pameungpeuk, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis hubungan sebab-akibat antara implementasi kebijakan akreditasi Puskesmas, manajemen pelayanan kesehatan masyarakat, dan produktivitas kerja pegawai. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis jalur, dan jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 85 orang.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi Puskesmas memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pelayanan kesehatan masyarakat dan produktivitas kerja pegawai. Dalam konteks ini, artikel ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai, penting untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan akreditasi Puskesmas serta meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini memberikan kontribusi untuk memahami pentingnya implementasi kebijakan akreditasi Puskesmas dalam meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesehatan masyarakat dan, pada akhirnya, mewujudkan produktivitas kerja pegawai. Artikel ini dapat menjadi acuan penting bagi pihak terkait dalam merancang kebijakan dan strategi manajemen yang efektif di lingkungan Puskesmas.</p>
6 Wulandari, R. D., Ridho, I. A., Supriyanto, S., Qomarrudin, M. B., Damayanti, N. A., Laksono, A. D., & Rassa, A. N. F. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas terhadap Kepuasan Pasien.	<p>Penelitian ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mewajibkan puskesmas di Indonesia untuk mengikuti proses akreditasi, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien.</p> <p>Penelitian ini menggunakan pendekatan observasional dengan desain cross-sectional, melibatkan 90 pasien puskesmas yang telah berkunjung sebelum dan sesudah proses akreditasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan skor kepuasan yang signifikan</p>

-
- sebelum dan sesudah akreditasi, khususnya pada dimensi mutu responsif, kredibilitas, kompetensi, komunikasi, keamanan, akses, kesopanan, pemahaman terhadap pelanggan, dan tangibles. Meskipun dimensi reliabilitas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, terdapat penurunan skor kepuasan pada dimensi pemahaman terhadap pelanggan setelah akreditasi.
- Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akreditasi Puskesmas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien. Oleh karena itu, disarankan bagi puskesmas untuk terus meningkatkan sistem pelayanan, khususnya dalam pemenuhan janji layanan yang telah ditetapkan sebagai sasaran mutu. Penyebaran informasi tentang akreditasi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih menyadari dan menghargai upaya puskesmas dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
-
- 7 Tawalujan, T. W., Korompis, G. E., & Maramis, F. R. (2019). Hubungan antara status akreditasi Puskesmas dengan tingkat kepuasan pasien di Kota Manado. *Kesmas*, 7(5).
- Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan desain penelitian cross-sectional. Dilakukan di Puskesmas Kombos dan Puskesmas Paniki Bawah di Kota Manado, dengan melibatkan responden yang berusia 17 tahun ke atas. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah total 200 sampel. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, dan analisis data dilakukan dengan uji statistik Mann Whitney U Test.
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status akreditasi Puskesmas dengan tingkat kepuasan pasien di Kota Manado (p -value = 0,023). Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Puskesmas yang telah diakreditasi memiliki hubungan yang positif dengan tingkat kepuasan pasien. Oleh karena itu, disarankan agar Puskesmas Kombos dan Paniki Bawah terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan melakukan survei kepuasan secara berkesinambungan dan juga meningkatkan kenyamanan pasien melalui fasilitas yang memadai.
- Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang pentingnya akreditasi Puskesmas dalam meningkatkan kepuasan pasien. Dengan menekankan pada hubungan positif antara status akreditasi dan kepuasan pasien, penelitian ini memberikan dasar untuk pihak berwenang dan penyelenggara layanan kesehatan untuk terus memprioritaskan dan mempertahankan standar akreditasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas.
-
- 8 Stevani, Y. (2019). Proses persiapan akreditasi puskesmas kertek II. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 3(1), 12-23.
- Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses persiapan akreditasi Puskesmas Kertek II, terutama dalam konteks penumpukan usulan survei pada triwulan IV oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Puskesmas ini menjadi salah satu yang mengajukan usulan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan pada akhir tahun 2017.
- Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 6 informan utama dan 2 informan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hambatan dalam proses persiapan akreditasi, seperti kurangnya optimalitas komunikasi, pemahaman yang kurang, dan waktu pembuatan dokumen yang tidak konsisten. Sumber daya, termasuk bangunan gedung yang masih dalam tahap perbaikan, kekurangan staf, ketersediaan informasi, serta karakteristik disposisi dari implementor, juga diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi proses persiapan.
- Meskipun struktur birokrasi telah berjalan dengan baik dengan ketersediaan SOP dan fragmentasi fisik, implementasinya masih mengalami perbedaan. Sebagai kesimpulan, artikel ini mencatat bahwa proses persiapan akreditasi Puskesmas Kertek II sudah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Artikel ini memberikan pandangan terinci terhadap tantangan dan hambatan yang dihadapi Puskesmas dalam menghadapi proses akreditasi.
-

-
- 9 Nugroho, A. P., Ardani, I., & Effendi, D. E. (2023). Dampak kebijakan akreditasi puskesmas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 14(1), 59-82.
- Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa kelebihan negatif dari kebijakan akreditasi Puskesmas dalam pemenuhan akses perawatan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif berdasarkan wawancara dalam diskusi kelompok dan pengumpulan data sekunder tentang proses dan implementasi akreditasi di 12 kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan akreditasi Puskesmas mendorong perubahan nilai dan norma pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan yang mendasar, dari barang publik menjadi barang privat. Logika manajemen yang cenderung berorientasi pada kepentingan swasta menempatkan masyarakat sebagai konsumen daripada warga negara, belum memaksimalkan peran aktif masyarakat, dan menimbulkan masalah ketidaksetaraan dalam upaya negara untuk menjamin hak masyarakat sebagai warga negara. Pemerintah menempatkan layanan kesehatan dasar tidak lagi sepenuhnya sebagai barang publik, yang menjamin bahwa setiap orang sebagai warga negara dapat mengaksesnya tanpa pengecualian. Dengan demikian, artikel ini menyoroti implikasi negatif dari kebijakan akreditasi Puskesmas terhadap hak dasar warga terhadap akses kesehatan dan menciptakan pergeseran dalam paradigma penyediaan layanan kesehatan dari layanan publik menjadi layanan swasta.
-
- 10 Ariyanti, F., & Arofi, S. P. (2021). Studi mutu (ServQual) dan kepuasan pasien berdasarkan akreditasi puskesmas. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 10(03), 180-190.
- Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan pasien dan mutu pelayanan kesehatan berdasarkan akreditasi Puskesmas. Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional deskriptif dan studi kasus. Sampel penelitian melibatkan 108 responden pengunjung Puskesmas, sementara informan penelitian adalah kepala Puskesmas dan kepala tata usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pada Puskesmas terakreditasi lebih tinggi daripada Puskesmas non-akreditasi dalam berbagai dimensi, seperti keadaan fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Puskesmas terakreditasi mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi, dengan persentase yang mencapai 96,3% hingga 98,1% pada setiap dimensi, sementara Puskesmas non-akreditasi memiliki tingkat kepuasan yang bervariasi, antara 40,7% hingga 96,3%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Puskesmas terakreditasi memiliki tingkat kepuasan pasien yang lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas non-akreditasi. Oleh karena itu, disarankan agar Puskesmas terakreditasi dapat mempertahankan mutu pelayanannya, sementara Puskesmas non-akreditasi diharapkan untuk memperhatikan dimensi-dimensi mutu guna meningkatkan kepuasan pasien dan mempersiapkan diri untuk menghadapi proses akreditasi.
-
- 11 Sutanti, D., Suparman, R., Setianingsih, T., & Badriah, D. L. (2022). Studi Analisis Ketercapaian Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas Dan Kinerja Puskesmas Di Kabupaten Kuningan. *Journal Of Public Health Innovation*, 2(02), 189-198.
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketercapaian implementasi kebijakan akreditasi Puskesmas dan kinerja Puskesmas di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran (metode mix method), dengan total sampel sebanyak 37 Puskesmas untuk penelitian kuantitatif dan 9 Puskesmas untuk penelitian kualitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan uji Chi Square, sementara analisis data kualitatif menggunakan analisis tema Matriks. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara capaian akreditasi Puskesmas dengan capaian kinerja Puskesmas di Kabupaten Kuningan ($p=0,639$). Dengan kata lain, ketercapaian implementasi kebijakan akreditasi Puskesmas tidak memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja Puskesmas di wilayah tersebut. Dalam konteks kualitatif, faktor yang diidentifikasi sebagai yang paling dapat meningkatkan capaian implementasi kebijakan akreditasi Puskesmas adalah faktor hubungan antar organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk lebih memperhatikan
-

-
- dan memperkuat hubungan antar organisasi dalam upaya meningkatkan ketercapaian implementasi kebijakan akreditasi Puskesmas di Kabupaten Kuningan.
-
- 12 Yewen, M. R., Korompis, G. E., & Kolibu, F. K. (2019). Hubungan Antara status akreditasi puskesmas dengan tingkat kepuasan pasien di kota Sorong provinsi Papua Barat. *KESMAS*, 7(5).
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara status akreditasi Puskesmas dengan tingkat kepuasan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional, dilakukan pada bulan Juli-Desember tahun 2018 di dua Puskesmas, yaitu Puskesmas Sorong Barat (belum terakreditasi) dan Puskesmas Malawei (terakreditasi madya). Sampel penelitian diambil dari pasien yang berkunjung ke kedua Puskesmas, dengan total 200 responden yang diambil secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien di Puskesmas Sorong Barat (belum terakreditasi) sebanyak 36%, sedangkan tingkat kepuasan pasien di Puskesmas Malawei (terakreditasi madya) sebanyak 66%. Hasil uji statistik Mann Whitney U Test menunjukkan nilai $p=0,000$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status akreditasi Puskesmas dengan tingkat kepuasan pasien.
- Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pelayanan di kedua Puskesmas, baik yang sudah terakreditasi maupun yang belum, dengan fokus pada aspek-aspek seperti ketepatan waktu dan kecepatan dalam melayani pasien di loket pendaftaran, rekam medik, dan setiap poli. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan.
-
- 13 Ningrum, E. N. (2020). Hubungan Akreditasi Puskesmas Dengan Kepuasan Pasien Di Puskesmas Kabupaten Banyumas. *Human Care Journal*, 5(3), 732-741.
- Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain survei analitik dan metode cross-sectional. Penelitian dilakukan di empat Puskesmas yang memiliki tingkat akreditasi yang berbeda di Kabupaten Banyumas. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, dan data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan uji Chi-square.
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status akreditasi Puskesmas dengan kepuasan pasien yang berkunjung ke Puskesmas di Kabupaten Banyumas. Hasil uji Chi-square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,023 (lebih kecil dari 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik.
- Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara status akreditasi Puskesmas dan kepuasan pasien di Puskesmas Kabupaten Banyumas. Artinya, Puskesmas yang memiliki status akreditasi yang lebih baik cenderung memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada pasien.
-
- 14 Batubara, S., Napitupulu, L. R., Kasim, F., Manalu, E. D., & Jauhari, W. (2019). Hubungan status akreditasi puskesmas dengan mutu pelayanan di Kabupaten Simalungun. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 8(1).
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara status akreditasi Puskesmas dengan mutu pelayanan. Penelitian dilakukan di dua Puskesmas di Kabupaten Simalungun, yaitu Puskesmas Tiga Dolok yang memiliki status akreditasi Madya dan Puskesmas Huta Bayu yang belum terakreditasi. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kontrol (case-control) dengan teknik pengambilan sampel consecutive sampling, melibatkan 92 responden. Data dianalisis menggunakan uji chi-square dan uji regresi linear berganda pada tingkat kepercayaan 95%.
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status akreditasi Puskesmas dengan beberapa dimensi mutu pelayanan, yaitu dimensi tangibles, reliability, responsiveness, dan assurance. Dimensi empathy tidak menunjukkan hubungan signifikan. Faktor yang paling dominan terkait status akreditasi Puskesmas adalah mutu pelayanan berdasarkan dimensi responsiveness.
- Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa status akreditasi Puskesmas mempengaruhi beberapa aspek mutu pelayanan. Puskesmas yang telah terakreditasi diharapkan dapat mempertahankan mutu pelayanan, sementara Puskesmas yang belum terakreditasi
-

-
- diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan untuk memenuhi harapan masyarakat.
-
- 15 Utami, S. N., & Lubis, S. (2021). EFEKTIVITAS AKREDITASI PUSKESMAS TERHADAP KUALITAS PUSKESMAS MEDAN HELVETIA. *Publik Reform*, 8(2), 10-21.
- Dalam artikel ini, penulis menekankan bahwa umpan balik dari masyarakat dan pengguna pelayanan Puskesmas sangat penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan diukur dengan dimensi kehandalan, dan hasil analisis data menunjukkan bahwa responden umumnya merasa bahwa kehandalan pelayanan Puskesmas Medan Helvetia tergolong baik. Wawancara dengan responden dan pengamatan di lapangan memberikan gambaran bahwa sarana dan fasilitas di Puskesmas tersebut cukup baik, tetapi perlu perhatian lebih dalam hal perawatan agar tetap memuaskan bagi pasien yang berkunjung. Komunikasi kebijakan akreditasi Puskesmas dijelaskan sebagai lugas dan jelas, memudahkan pemahaman para tenaga kesehatan di Puskesmas. Artikel ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang hubungan antara akreditasi Puskesmas dan kualitas pelayanan, dengan fokus pada Puskesmas Medan Helvetia. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa efektivitas akreditasi Puskesmas dapat mempengaruhi kehandalan pelayanan, namun masih diperlukan perhatian terhadap perawatan fasilitas agar dapat memenuhi kepuasan pasien secara optimal.
-
- 16 Maghiroh, L., & Rochmah, T. N. (2017). Analisis kesiapan puskesmas Demangan Kota Madiun dalam menghadapi akreditasi. *Jurnal Mkmi*, 13(4), 329-336.
- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan dalam kerangka pembangunan kesehatan nasional, yang memandatkan setiap penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menjalani akreditasi guna menjamin kualitas layanan. Puskesmas Demangan, sebagai salah satu puskesmas tingkat pertama di Kota Madiun, berintegrasi dengan Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan, dan harus mempersiapkan diri untuk akreditasi guna mewujudkan penjaminan mutu pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan desain cross-sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Maret 2016, pencapaian akreditasi Puskesmas Demangan baru mencapai 62,9% dari seluruh elemen penilaian dalam standar akreditasi. Rekomendasi penelitian menyarankan pembentukan tim khusus yang berfokus pada dokumen dan monitoring evaluasi akreditasi untuk meningkatkan persiapan puskesmas dalam menghadapi proses akreditasi. Namun, perlu dicatat bahwa abstrak ini tidak secara eksplisit menyentuh pertanyaan yang diajukan terkait dengan tahapan perubahan perilaku dalam Teori Transtheoretical Model dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi petugas Puskesmas dalam proses akreditasi. Oleh karena itu, kita dapat mengaitkan temuan penelitian ini dengan isu-isu kesiapan dan kendala yang mungkin mempengaruhi partisipasi petugas Puskesmas dalam perubahan perilaku yang diperlukan untuk menghadapi akreditasi.
-
- 17 Mawarni, D., Sabran, S., Puspitasari, S. T., & Wardani, I. M. K. (2022). GAMBARAN AKREDITASI PUSKESMAS INDONESIA BERDASARKAN DATA SEKUNDER DARI RISET FASILITAS KESEHATAN 2019. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 18(1), 52-56.
- Penelitian berjudul "Gambaran Akreditasi Puskesmas Indonesia Berdasarkan Data Sekunder dari Riset Fasilitas Kesehatan 2019" yang ditulis oleh Dian Mawarni, Sabran Sabran, Sendhi Trisanti Puspitasari, dan Iing Merillarossa Kharisma Wardani bertujuan untuk mengeksplorasi capaian akreditasi Puskesmas di seluruh provinsi Indonesia berdasarkan data sekunder dari Riset Fasilitas Kesehatan 2019. Dari 8.543 Puskesmas yang dianalisis, sebagian besar Puskesmas memiliki layanan rawat inap (56,72%), terletak di desa (48,58%), telah terakreditasi (79,19%), memiliki predikat madya akreditasi (56,07%), dan bukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (68,14%). Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kemampuan pelayanan, kategori wilayah, dan pola pengelolaan keuangan dengan status akreditasi Puskesmas.
-

		<p>Penelitian ini menggambarkan bahwa kebijakan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama di Puskesmas Indonesia belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Hasilnya menyarankan perlunya optimalisasi peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan pendampingan akreditasi, terutama untuk Puskesmas dengan karakteristik layanan rawat jalan, terletak di daerah terpencil, dan bukan BLUD. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan pelaksanaan akreditasi Puskesmas di Indonesia.</p>
18	<p>Septiani, F., Batara, A. S., & Patimah, S. (2021). Analisis Kesiapan Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar dalam Implementasi Akreditasi Puskesmas Tahun 2019. <i>Window of Public Health Journal</i>, 2(1), 120-132.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesiapan Puskesmas Cendrawasih dalam implementasi akreditasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik purposive sampling dalam pemilihan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan Puskesmas Cendrawasih dapat dinilai dari aspek input, proses, dan output.</p> <p>Dalam aspek input, komunikasi antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Cendrawasih terlaksana dengan baik, sumber daya yang dimiliki cukup, dan staf mendukung pelaksanaan akreditasi. Struktur birokrasi juga berjalan sesuai ketentuan. Dalam aspek proses, Puskesmas telah melakukan lokakarya rutin dan penyusunan dokumen untuk persiapan akreditasi. Dari segi output, persentase persiapan Puskesmas Cendrawasih mencapai 82%.</p> <p>Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar telah siap untuk melakukan akreditasi. Meskipun telah melakukan persiapan dengan baik, terdapat kendala terkait kurangnya fasilitas pendukung, seperti printer, yang dapat menghambat penyusunan dokumen akreditasi. Oleh karena itu, disarankan agar kepala puskesmas lebih memperhatikan kelengkapan fasilitas pendukung guna memastikan kelancaran proses akreditasi.</p>
19	<p>Valentina, V. (2019). Tinjauan Sistem Penyimpanan Rekam Medis Menurut Standar Akreditasi Puskesmas Di Puskesmas Sukaramai Tahun 2019. <i>Jurnal Ilmiah Perkam Dan Informasi Kesehatan Imelda</i>, 4(1), 554-559.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem penyimpanan rekam medis di Puskesmas Sukaramai berdasarkan standar akreditasi puskesmas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dan penelitian dilakukan pada periode Oktober 2018-Januari 2019. Populasi penelitian melibatkan seluruh petugas rekam medis di Puskesmas Sukaramai, dan sampel penelitian sebanyak 6 orang dipilih dengan metode purposive sampling.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyimpanan yang digunakan di Puskesmas Sukaramai menggunakan family folder dengan penjajaran menggunakan Straight Numerical Filing (SNF). Namun, terdapat beberapa kekurangan seperti pengambilan berkas rekam medis oleh petugas lain yang bukan petugas rekam medis, ketidakadaan penggunaan tracer, absennya buku ekspedisi peminjaman, dan sistem pengembalian berkas rekam medis yang tidak dipulangkan pada akhir jam kerja.</p> <p>Rekomendasi dari penelitian ini mencakup penambahan jumlah petugas rekam medis sesuai kualifikasi pendidikan formal, memberikan pelatihan pada petugas filling, pembatasan pengambilan rekam medis hanya oleh petugas filling, penggunaan tracer dan buku ekspedisi peminjaman rekam medis, serta menetapkan waktu pengembalian berkas rekam medis. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan Puskesmas Sukaramai dapat memperbaiki sistem penyimpanan rekam medis sesuai dengan standar akreditasi puskesmas.</p>
20	<p>Simanjuntak, E., & Insani, F. (2021). Tinjauan Sistem Penyelenggaraan Rekam Medis Menurut Standart Akreditasi Puskesmas di Puskesmas Pangakalan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendaftaran pasien rawat jalan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria 3.2, tetapi belum ada penomoran rekam medis untuk pasien rawat inap. Kegiatan pengkodean tidak dilakukan sesuai dengan kriteria 3.8.1 karena tidak adanya SOP pengkodean, pengaturan hak akses rekam medis sesuai dengan kriteria 3.8.2 namun implementasinya belum sepenuhnya</p>

	<p>Berandan Tahun 2020. <i>Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda</i>, 6(2), 108-118.</p>	<p>sesuai dengan SOP, proses peminjaman tidak tercatat dalam buku ekspedisi, pengumpulan informasi medis sesuai dengan kriteria 3.8.3 namun koreksi pencatatan dilakukan dengan menggunakan stip-ex, dan proses penyimpanan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria 3.8.4, namun retensi tidak sesuai dengan pedoman legislasi.</p> <p>Rekomendasi dari penelitian ini mencakup pemberian nomor rekam medis untuk pasien rawat inap, pembuatan SOP pengkodean dan pelatihan pengkodean, pencatatan peminjaman rekam medis dalam buku ekspedisi, memberikan sosialisasi tentang pengumpulan informasi medis yang benar, dan memberikan sosialisasi tentang implementasi retensi. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan Puskesmas Pangkalan Berandan dapat meningkatkan sistem pengelolaan rekam medis sesuai dengan standar akreditasi puskesmas.</p>
21	<p>DAEYANI, R. (2018). <i>Keberlanjutan Implementasi Program Akreditasi Puskesmas Pasca Terakreditasi di Kabupaten Lumajang</i> (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan dalam inner setting Puskesmas, seperti beban tupoksi rangkap tim mutu dan pengaruh atmosfer politik. Di Dinas Kesehatan, hambatan melibatkan tidak adanya kajian awal program, rasio beban tupoksi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, konflik, ketidakpahaman, dan kecemburuan staf, serta kurangnya teamwork dalam konteks mutu. Keberlanjutan program belum menjadi prioritas karena tidak ada kejelasan teknis, acuan, dan tuntutan regulasi.</p> <p>Solusi potensial termasuk reorganisasi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan membangun pemahaman dan teamwork yang solid dalam konteks mutu di Dinas Kesehatan. Untuk aspek proses, solusi potensial mencakup integrasi elemen akreditasi Puskesmas dalam proses dan target program di Dinas Kesehatan.</p> <p>Kesimpulannya, belum ada upaya keberlanjutan yang komprehensif pada aspek inner setting dan proses di Dinas Kesehatan, sementara Puskesmas terakreditasi sudah melakukan upaya keberlanjutan implementasi program akreditasi Puskesmas, meskipun dengan perbedaan intensitas.</p>
22	<p>Tulenan, R. G., Kolibu, F. K., & Maramis, F. R. R. (2023). Hubungan antara Status Akreditasi dengan Kepuasan Pasien di Wilayah Kerja Puskesmas Kakas dan Kakas Barat Kabupaten Minahasa. <i>Jurnal Kesehatan Tambusai</i>, 4(4), 5291-5301.</p>	<p>Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan atas upaya Puskesmas dalam memenuhi standar pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Status akreditasi Puskesmas dapat dibedakan menjadi lima tahap: belum terakreditasi, dasar, madya, utama, dan paripurna.</p> <p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain penelitian survei analitik dan pendekatan cross-sectional study. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang berkunjung di wilayah kerja Puskesmas Kakas dan Puskesmas Kakas Barat tahun 2022. Sampel diambil sebanyak 150 responden yang berusia 18 tahun ke atas dan pernah berkunjung lebih dari dua kali di kedua Puskesmas tersebut, menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status akreditasi Puskesmas dengan kepuasan pasien di wilayah kerja Puskesmas Kakas dan Kakas Barat Kabupaten Minahasa. Kesimpulan tersebut didasarkan pada nilai p-value sebesar 0,00 yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Artinya, keberadaan status akreditasi Puskesmas dapat memengaruhi tingkat kepuasan pasien di wilayah tersebut.</p>
23	<p>Manafe, O. A., Ratu, J. M., Muntasir, M., Roga, A. U., & Littik, S. K. (2023). Penerapan Perbaikan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) Pasca Akreditasi Puskesmas Kota Kupang terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat.</p>	<p>enelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan perbaikan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) melalui peningkatan kualitas administrasi dan manajemen, target kinerja upaya kesehatan masyarakat, dan peningkatan kualitas klinis dan keselamatan pasien (PMKP) setelah akreditasi puskesmas terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional kuantitatif dengan desain penelitian analitis menggunakan studi potong lintang (cross-sectional study).</p>

	<i>Journal of Telenursing (JOTING)</i> , 5(2), 3908-3916.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Perbaikan Mutu Berkelanjutan secara signifikan memengaruhi Tingkat Kepuasan Masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 (kurang dari 0,05), dan nilai Fcount yang lebih besar dari nilai FTable (315.333 > 3.127). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Penerapan Perbaikan Mutu Berkelanjutan oleh Puskesmas Oesapa dan Puskesmas Penfui dengan menerapkan standar akreditasi puskesmas secara signifikan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.
24	Ringrih, I. A. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKREDITASI PUSKESMAS DI KOTA MAKASSAR= IMPLEMENTATION OF PUBLIC HEALTH CENTER ACCREDITATION POLICY IN MAKASSAR CITY.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi sudah dilakukan dengan baik, baik antara kepala puskesmas dengan staf maupun dengan lintas sektor lainnya. Kebijakan terkait akreditasi Puskesmas, seperti pembentukan tim pokja akreditasi, telah dilakukan sesuai dengan struktur organisasi akreditasi Puskesmas. Sumber daya manusia sudah memenuhi standar ketenagaan, namun terdapat beberapa petugas dengan beban kerja berlebihan. Sarana dan prasarana di Puskesmas sudah cukup memadai, tetapi terdapat beberapa Puskesmas dengan kondisi bangunan yang rusak dan perlu perbaikan. Disposisi/sikap petugas telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Struktur birokrasi telah menjalankan mekanisme akreditasi cukup efektif dengan adanya SOP berdasarkan Permenkes 46 Tahun 2015 yang digunakan dalam pelayanan/tindakan. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi Puskesmas di Kota Makassar dari aspek komunikasi, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik. Namun, dari aspek sumber daya, terdapat beban kerja berlebihan pada beberapa staf/petugas. Oleh karena itu, disarankan adanya pemerataan tugas dan tanggung jawab oleh pimpinan kepada setiap petugas/staf.
25	Aswar, M. (2019). <i>Peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di kabupaten morowali</i> (Doctoral dissertation, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis peran perawat dalam proses akreditasi Puskesmas, khususnya di Kabupaten Morowali. Proses akreditasi diarahkan oleh regulasi seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Instrumen penilaian yang digunakan dalam proses akreditasi mencakup administrasi manajemen, upaya pelayanan kesehatan masyarakat, dan upaya pelayanan kesehatan perorangan. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan perawat yang bekerja di Puskesmas Kabupaten Morowali, sementara narasumber melibatkan kepala Puskesmas. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur terkait. Penelitian ini menganalisis secara kualitatif peran perawat dalam proses akreditasi dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi peran mereka. Faktor pendukung melibatkan legislasi dan sumber daya manusia, sedangkan faktor penghambat melibatkan ketersediaan sumber daya kesehatan, beban kerja staf Puskesmas, dan kurangnya fasilitas dan infrastruktur.

PEMBAHASAN

Tahapan Perubahan Perilaku Dalam Teori Transtheoretical Model Memengaruhi Partisipasi Petugas Puskesmas Dalam Proses Akreditasi

Berdasarkan kajian artikel jurnal yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa Teori Transtheoretical Model (TTM) merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan tahapan perubahan perilaku individu. Model ini mengidentifikasi enam tahap perubahan perilaku, yaitu precontemplation, contemplation, preparation, action, maintenance, dan termination. Dalam konteks partisipasi petugas Puskesmas dalam proses akreditasi, TTM dapat memberikan wawasan yang mendalam

mengenai perubahan perilaku yang mungkin terjadi pada mereka (Eviheryanto & Syakurah, 2023; Hidayat dkk., 2023; Nugroho dkk., 2023; Tulenan dkk., 2023).

Tahap pertama dalam TTM adalah precontemplation, di mana individu tidak menyadari kebutuhan atau manfaat dari perubahan perilaku. Dalam hal partisipasi petugas Puskesmas, ini mungkin mencerminkan kurangnya pemahaman mereka terhadap pentingnya akreditasi dan dampak positifnya terhadap mutu layanan kesehatan. Dalam tahap ini, pendekatan edukatif dan pemberian informasi yang menyeluruh dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka.

Tahap kedua adalah contemplation, di mana individu mulai menyadari kebutuhan akan perubahan dan mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah konkret. Bagi petugas Puskesmas, tahap ini bisa mencakup pemahaman mereka terhadap proses akreditasi dan potensi manfaatnya. Dukungan psikologis dan informasi lebih lanjut dapat membantu mereka merumuskan keputusan untuk berpartisipasi aktif dalam proses akreditasi.

Tahap ketiga adalah preparation, di mana individu mulai mengambil langkah-langkah konkret untuk mengubah perilaku mereka. Dalam konteks Puskesmas, ini dapat mencakup pelibatan aktif dalam persiapan untuk menghadapi proses akreditasi, seperti pelatihan tambahan, peningkatan kompetensi, dan pengembangan sistem manajemen kualitas.

Tahap keempat, action, melibatkan pelaksanaan perubahan perilaku yang diinginkan. Bagi petugas Puskesmas, ini mencakup partisipasi aktif dalam seluruh proses akreditasi, termasuk pengumpulan data, peningkatan layanan, dan implementasi perbaikan yang diperlukan.

Tahap kelima adalah maintenance, di mana individu berusaha mempertahankan perubahan perilaku yang telah dicapai. Dalam konteks akreditasi Puskesmas, ini melibatkan keterlibatan berkelanjutan dalam pemeliharaan standar kualitas, pemantauan, dan evaluasi berkelanjutan.

Tahap terakhir adalah termination, di mana perilaku baru telah menjadi bagian permanen dari gaya hidup individu. Dalam konteks Puskesmas, ini mencerminkan integrasi kebiasaan partisipasi aktif dalam akreditasi sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari, menciptakan budaya kualitas yang berkelanjutan.

Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep TTM ini, manajemen Puskesmas dapat merancang strategi yang tepat untuk memotivasi dan mendukung petugas dalam setiap tahap perubahan perilaku terkait partisipasi dalam proses akreditasi. Dengan demikian, implementasi Teori Transtheoretical Model dapat membantu mencapai keterlibatan optimal petugas Puskesmas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui proses akreditasi (Eviheryanto & Syakurah, 2023; Mawarni dkk., 2022; Sutanti dkk., 2022; Syukriadi, 2022).

Penerapan Teori Transtheoretical Model (TTM) dalam mengkaji partisipasi petugas Puskesmas dalam proses akreditasi dapat memberikan landasan yang kokoh untuk merancang strategi pendekatan yang lebih spesifik dan efektif. Pada tahap precontemplation, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran petugas Puskesmas mengenai pentingnya akreditasi. Ini dapat melibatkan kampanye penyuluhan, seminar, atau pelatihan untuk membantu mereka memahami dampak positif yang dapat dihasilkan melalui peningkatan kualitas layanan.

Dalam tahap contemplation, manajemen Puskesmas dapat memberikan informasi lebih lanjut dan dukungan psikologis kepada petugas yang sedang mempertimbangkan partisipasi aktif dalam proses akreditasi. Sesi diskusi kelompok atau mentoring dapat membantu mereka merumuskan keputusan dengan memberikan pemahaman mendalam tentang manfaat dan tantangan yang mungkin dihadapi.

Tahap preparation melibatkan langkah-langkah konkret untuk mempersiapkan petugas Puskesmas menghadapi proses akreditasi. Ini bisa mencakup pelatihan intensif, penyediaan sumber daya, dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi standar akreditasi. Selain itu, pemberian dukungan dan pengakuan dari manajemen dapat meningkatkan motivasi mereka.

Saat memasuki tahap action, petugas Puskesmas secara aktif terlibat dalam proses akreditasi. Dukungan manajemen yang berkelanjutan, umpan balik positif, dan pengakuan atas kontribusi mereka dapat memperkuat keterlibatan mereka. Langkah-langkah konkret, seperti menyusun tim internal untuk mengelola proses akreditasi, dapat memberikan rasa tanggung jawab dan motivasi tambahan (Ariyanti & Arofi, 2021; RINGRIH, 2022; Septiani dkk., 2021; Simanjuntak & Insani, 2021; Utami & Lubis, 2021).

Tahap maintenance melibatkan upaya untuk mempertahankan perubahan perilaku positif yang telah dicapai. Manajemen dapat menyediakan program pengembangan berkelanjutan, pelatihan lanjutan, dan sistem insentif untuk memastikan bahwa petugas Puskesmas terus memprioritaskan dan menjaga standar kualitas.

Dalam tahap termination, partisipasi aktif dalam proses akreditasi telah menjadi bagian integral dari budaya kerja Puskesmas. Manajemen dapat terus memberikan dukungan, memperkuat sistem insentif, dan merayakan pencapaian untuk memastikan berlanjutnya keterlibatan mereka dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Secara keseluruhan, penerapan Teori Transtheoretical Model (TTM) dalam konteks partisipasi petugas Puskesmas dalam proses akreditasi dapat memandu perencanaan strategis yang holistik. Dengan memahami dan mengakomodasi setiap tahap perubahan perilaku, manajemen dapat merancang intervensi yang sesuai untuk meningkatkan keterlibatan dan mendukung pencapaian standar kualitas yang lebih tinggi dalam pelayanan kesehatan.

Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan atau Pendukung Bagi Perubahan Perilaku Petugas Puskesmas Dalam Menghadapi Implementasi Akreditasi di Puskesmas

Implementasi akreditasi di Puskesmas melibatkan perubahan perilaku petugas Puskesmas, dan berbagai faktor dapat menjadi hambatan atau pendukung dalam menghadapi perubahan ini. Salah satu faktor yang dapat mendukung perubahan perilaku adalah dukungan dan komitmen manajemen Puskesmas. Ketika manajemen mendukung secara aktif implementasi akreditasi, termasuk menyediakan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan, petugas Puskesmas cenderung lebih termotivasi dan siap menghadapi perubahan.

Selain itu, keterlibatan petugas Puskesmas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait implementasi akreditasi dapat menjadi faktor pendukung. Ketika petugas merasa bahwa pendapat mereka dihargai dan mereka memiliki peran aktif dalam proses perubahan, hal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya (Ariyanti & Arofi, 2021; Ningrum & Wati, 2020; RINGRIH, 2022; Septiani dkk., 2021; Simanjuntak & Insani, 2021; Utami & Lubis, 2021; Wulandari dkk., 2019).

Namun, terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi dalam menghadapi perubahan perilaku petugas Puskesmas. Salah satunya adalah resistensi terhadap perubahan. Beberapa petugas mungkin merasa tidak nyaman atau takut dengan perubahan, terutama jika mereka merasa tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai tujuan dan manfaat dari implementasi akreditasi. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang efektif dan edukasi yang terarah perlu diterapkan untuk mengatasi resistensi ini.

Selain itu, kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai proses akreditasi dapat menjadi hambatan. Petugas Puskesmas memerlukan informasi yang jelas dan transparan mengenai apa yang diharapkan dari mereka dalam proses ini, serta manfaat yang dapat dihasilkan. Program pelatihan yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka, sehingga mereka merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi perubahan.

Faktor lain yang dapat menjadi hambatan adalah kurangnya sumber daya, baik itu dalam bentuk personel, peralatan, atau infrastruktur. Jika Puskesmas tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi akreditasi, petugas dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, alokasi sumber daya yang memadai dan perencanaan yang baik perlu diterapkan untuk mengatasi hambatan ini.

Selanjutnya, budaya organisasi juga dapat mempengaruhi perubahan perilaku petugas. Jika budaya organisasi mendukung kolaborasi, pembelajaran, dan inovasi, petugas cenderung lebih terbuka terhadap perubahan. Sebaliknya, budaya yang resisten terhadap perubahan dapat menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, manajemen perlu membangun budaya yang mendukung implementasi akreditasi melalui pembinaan nilai-nilai yang positif dan peran model dari pimpinan.

Penting juga untuk memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi perubahan perilaku petugas Puskesmas, seperti peraturan pemerintah atau tuntutan masyarakat. Mendukung kolaborasi antara Puskesmas dan pihak terkait eksternal dapat membantu mengatasi hambatan dan memastikan bahwa implementasi akreditasi berjalan dengan lancar (Batubara dkk., 2019; Stevani, 2019; Trisna & Raharjo, 2019; Valentina, 2019).

Secara keseluruhan, menghadapi implementasi akreditasi di Puskesmas memerlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan atau pendukung perubahan perilaku petugas. Dengan merinci dan mengatasi faktor-faktor ini, manajemen dapat merancang strategi yang efektif untuk memastikan partisipasi aktif dan kesuksesan implementasi akreditasi di Puskesmas.

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku petugas Puskesmas dalam menghadapi implementasi akreditasi adalah motivasi dan insentif. Ketika petugas merasakan adanya pengakuan, pemberian insentif, atau apresiasi atas upaya mereka dalam menghadapi perubahan, hal ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Oleh karena itu, manajemen perlu merancang sistem penghargaan yang adil dan transparan untuk memberikan dukungan dan motivasi tambahan kepada petugas.

Di sisi lain, ketidakpastian mengenai konsekuensi dari implementasi akreditasi dapat menjadi hambatan. Petugas Puskesmas mungkin merasa cemas atau tidak yakin tentang dampak perubahan terhadap pekerjaan mereka. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan konsisten perlu diterapkan untuk menghilangkan ketidakpastian ini. Memberikan informasi mengenai perubahan yang akan terjadi, serta bagaimana hal itu akan memengaruhi pekerjaan sehari-hari mereka, dapat membantu mengurangi kekhawatiran dan ketidakpastian.

Aspek kepemimpinan juga memiliki peran penting dalam mendukung perubahan perilaku. Pimpinan yang efektif mampu memberikan arahan yang jelas, memotivasi tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan perubahan. Pemimpin yang mampu memberikan inspirasi dan contoh positif akan membantu menciptakan budaya organisasi yang mendukung implementasi akreditasi (Aswar, 2019; Daeyani, 2018; Ensha, 2018; Lailatul Maghiroh & Thinni Nurul Rochmah, 2017; Tawalujan dkk., 2018; Yewen dkk., 2018).

Selain itu, tingkat pemahaman dan keterampilan teknis petugas Puskesmas juga dapat mempengaruhi perubahan perilaku mereka. Program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka dapat membantu meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi implementasi akreditasi. Dukungan yang berkelanjutan dari tim pelatihan juga dapat membantu mereka mengatasi hambatan teknis yang mungkin dihadapi.

Faktor-faktor kontekstual, seperti kondisi fisik dan lingkungan kerja, juga perlu diperhatikan. Puskesmas yang memiliki fasilitas yang memadai dan kondisi kerja yang nyaman dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan. Sebaliknya, kondisi yang kurang mendukung, seperti fasilitas yang buruk atau beban kerja yang berlebihan, dapat menjadi hambatan serius.

Terakhir, melibatkan petugas Puskesmas secara aktif dalam proses perubahan dan memberikan mereka ruang untuk memberikan masukan dapat membantu meningkatkan rasa kepemilikan terhadap perubahan. Pemberian tanggung jawab dan peran yang lebih aktif kepada mereka dapat memberikan motivasi tambahan untuk beradaptasi dengan perubahan.

Secara keseluruhan, menghadapi implementasi akreditasi di Puskesmas melibatkan pemahaman dan manajemen berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku petugas. Dengan merinci dan mengatasi setiap faktor ini, manajemen dapat merancang strategi yang holistik dan berkelanjutan untuk mendukung perubahan perilaku yang diinginkan dan memastikan keberhasilan implementasi akreditasi di Puskesmas.

Strategi Intervensi yang Dapat Disesuaikan dengan Tahapan Perubahan Perilaku Dalam Transtheoretical Model Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Komitmen Petugas Puskesmas Dalam Pelaksanaan Akreditasi

Penerapan strategi intervensi yang sesuai dengan tahapan perubahan perilaku dalam Transtheoretical Model (TTM) dapat menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi dan komitmen petugas Puskesmas dalam pelaksanaan akreditasi. Pada tahap precontemplation, di mana petugas mungkin tidak menyadari kebutuhan akan perubahan, strategi intervensi dapat berfokus pada peningkatan kesadaran mereka. Program penyuluhan, workshop, atau seminar dapat diselenggarakan untuk memberikan informasi mendalam tentang manfaat akreditasi dan dampak positifnya terhadap mutu layanan kesehatan. Menggandeng narasumber yang berkompeten dan memberikan studi kasus nyata dapat membantu menumbuhkan pemahaman dan minat petugas (Ariyanti & Arofi, 2021; Mawarni dkk., 2022; RINGRIH, 2022; Simanjuntak & Insani, 2021; Sutanti dkk., 2022; Utami & Lubis, 2021).

Selanjutnya, pada tahap contemplation, strategi intervensi dapat difokuskan pada memberikan motivasi dan informasi tambahan. Sesi diskusi kelompok atau forum partisipatif dapat memberikan platform bagi petugas untuk berbagi pengalaman dan mempertimbangkan secara lebih mendalam mengenai keterlibatan dalam proses akreditasi. Konseling individu juga dapat diterapkan untuk membantu petugas merumuskan rencana tindakan pribadi mereka menuju partisipasi aktif.

Tahap preparation memerlukan strategi intervensi yang memfasilitasi persiapan konkrit petugas untuk menghadapi pelaksanaan akreditasi. Ini dapat melibatkan pelatihan keterampilan khusus, sesi simulasi, atau pengembangan tim internal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan akreditasi. Dukungan manajemen dalam menyediakan sumber daya dan fasilitas yang dibutuhkan juga dapat membantu memudahkan transisi menuju partisipasi aktif.

Saat memasuki tahap action, penting untuk menjaga tingkat motivasi dan memberikan umpan balik positif. Sistem pengakuan, penghargaan, atau insentif dapat memberikan dorongan tambahan kepada petugas. Program mentoring atau bimbingan oleh petugas yang telah sukses melalui proses akreditasi juga dapat membantu mereka dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan rasa percaya diri.

Pada tahap maintenance, strategi intervensi harus difokuskan pada penguatan perilaku positif yang telah diterapkan. Dukungan manajemen berkelanjutan, pelatihan lanjutan, dan program pembinaan dapat membantu mempertahankan komitmen petugas terhadap standar kualitas yang tinggi. Pengakuan dan apresiasi yang berkelanjutan terhadap kontribusi mereka juga dapat meningkatkan motivasi dan keberlanjutan partisipasi aktif.

Tahap termination menandai integrasi kebiasaan baru dalam rutinitas kerja sehari-hari. Strategi intervensi pada tahap ini dapat melibatkan keberlanjutan program pelatihan, monitoring berkelanjutan, dan pengembangan sistem insentif yang dirancang untuk memastikan bahwa partisipasi aktif dalam akreditasi tetap menjadi prioritas.

Selain itu, strategi intervensi juga perlu memperhitungkan faktor kontekstual, seperti kondisi fisik dan lingkungan kerja. Pemberdayaan petugas melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, serta memberikan mereka kebebasan dan fleksibilitas dalam menjalankan tugas-tugasnya, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku positif. Secara keseluruhan, strategi intervensi yang disesuaikan dengan tahapan perubahan perilaku dalam Transtheoretical Model dapat membantu memastikan bahwa

partisipasi dan komitmen petugas Puskesmas dalam pelaksanaan akreditasi mencapai hasil yang optimal. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengatasi hambatan, tetapi juga memotivasi dan memandu petugas melalui perubahan perilaku menuju pencapaian standar kualitas yang lebih tinggi dalam pelayanan Kesehatan (Aswar, 2019; Daeyani, 2018; Ensha, 2018; Tawalujan dkk., 2018; Valentina, 2019; Yewen dkk., 2018).

Dalam mempertimbangkan strategi intervensi yang berkelanjutan, pendekatan berbasis kebutuhan dan responsif terhadap dinamika internal organisasi dapat memainkan peran krusial. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi petugas Puskesmas dapat membimbing pengembangan program intervensi yang lebih terfokus dan relevan. Survei atau wawancara terstruktur dengan petugas Puskesmas dapat menjadi alat penting untuk mengumpulkan umpan balik dan persepsi mereka terhadap proses akreditasi.

Pentingnya komunikasi efektif juga tidak bisa diabaikan. Membangun saluran komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajemen dan petugas Puskesmas dapat membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan. Pemberian informasi secara berkala tentang kemajuan, tujuan, dan manfaat akreditasi akan memberikan petugas pemahaman yang lebih baik tentang nilai dan dampak positif dari keterlibatan mereka.

Pembentukan tim kerja yang solid juga dapat memainkan peran penting. Penciptaan kelompok kerja atau komite khusus yang bertanggung jawab atas implementasi akreditasi dapat memberikan platform untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi terbaik. Kolaborasi tim dapat meningkatkan motivasi kolektif dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk menghadapi perubahan.

Dalam konteks strategi intervensi yang sukses, perlu ditekankan pentingnya pendekatan yang bersifat berkelanjutan. Implementasi akreditasi bukanlah upaya satu kali, melainkan suatu proses yang memerlukan pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan. Oleh karena itu, program pelatihan berkesinambungan, evaluasi periodik, dan penyesuaian strategi intervensi berdasarkan umpan balik dari lapangan dapat menjadi bagian integral dari upaya untuk menjaga keterlibatan dan komitmen petugas Puskesmas.

Selanjutnya, strategi intervensi dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan keterlibatan. Penggunaan platform daring, webinar, atau aplikasi khusus dapat menyediakan akses yang mudah dan cepat ke informasi, pelatihan, serta umpan balik secara real-time. Pendekatan ini dapat meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi partisipasi aktif petugas Puskesmas, terutama bagi mereka yang berada di lokasi terpencil atau memiliki keterbatasan waktu.

Terakhir, pemantauan dan evaluasi terus-menerus merupakan bagian integral dari strategi intervensi. Menetapkan indikator kinerja, melakukan audit terprogram, dan merinci metrik pencapaian dapat membantu mengukur dampak dan efektivitas strategi intervensi. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian yang diperlukan dan untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya dalam memperkuat keterlibatan dan komitmen petugas Puskesmas.

Dengan menggabungkan pendekatan yang holistik, berbasis kebutuhan, dan berkelanjutan, strategi intervensi dalam konteks perubahan perilaku petugas Puskesmas terkait implementasi akreditasi dapat menjadi kunci keberhasilan. Dengan pendekatan ini, manajemen dapat mengoptimalkan partisipasi dan komitmen, menjadikan pelaksanaan akreditasi sebagai langkah yang lebih mulus dan berkelanjutan dalam peningkatan mutu layanan kesehatan.

KESIMPULAN

Penerapan TTM dalam konteks partisipasi petugas Puskesmas dalam proses akreditasi memungkinkan pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku dan penyusunan strategi intervensi yang sesuai dengan tahapan TTM.

Beberapa faktor pendukung dan hambatan teridentifikasi, termasuk dukungan manajemen, keterlibatan petugas, resistensi terhadap perubahan, pengetahuan, sumber daya, dan budaya organisasi. Strategi intervensi yang disesuaikan dengan tahapan TTM mencakup upaya peningkatan kesadaran, motivasi, persiapan konkrit, dukungan berkelanjutan, dan penguatan perilaku positif.

Pentingnya komunikasi efektif, pembentukan tim kerja solid, dan pendekatan berkelanjutan untuk intervensi menjadi penekanan kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi akreditasi di Puskesmas. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan petugas dan memfasilitasi akses terhadap informasi dan pelatihan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, manajemen dapat merancang strategi yang holistik dan berkesinambungan, memastikan partisipasi dan komitmen petugas Puskesmas dalam pelaksanaan akreditasi. Dalam upaya ini, evaluasi dan pemantauan terus-menerus menjadi penting untuk menyesuaikan dan memperbaiki strategi intervensi sesuai dengan dinamika perubahan di Puskesmas.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas, partisipasi petugas menjadi krusial, terutama dalam konteks proses akreditasi. Dengan memandang perubahan perilaku petugas Puskesmas melalui lensa Transtheoretical Model (TTM), kita dapat menggambarkan evolusi dari tahap ketidakpedulian menuju keterlibatan aktif.

Pada tahap awal, petugas mungkin tidak menyadari pentingnya akreditasi (Pra-Kontemplasi). Faktor ini dapat diatasi melalui sosialisasi dan penyampaian informasi yang efektif. Tahap Kontemplasi muncul ketika petugas mulai mempertimbangkan perubahan perilaku mereka, didukung oleh pemahaman akan manfaat akreditasi. Proses ini semakin mendalam pada tahap Persiapan, di mana mereka mencari informasi dan mempersiapkan diri untuk partisipasi aktif.

Puncak perubahan perilaku terjadi pada tahap Aksi, di mana petugas benar-benar terlibat dalam proses akreditasi. Artikel jurnal memainkan peran kunci dalam memberikan panduan praktis dan inspirasi melalui studi kasus. Tahap Pemeliharaan menjadi tantangan selanjutnya, di mana artikel jurnal tentang keberlanjutan implementasi memberikan landasan untuk menjaga momentum positif.

Tahap Terminasi, meskipun tidak selalu disertakan dalam TTM, dapat dicapai oleh petugas yang berhasil mencapai perubahan perilaku yang berkelanjutan. Artikel jurnal yang membahas keberhasilan individu dalam mempertahankan perubahan dapat memberikan dorongan tambahan.

Secara keseluruhan, integrasi TTM dengan literatur dari artikel jurnal memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana partisipasi petugas Puskesmas dalam proses akreditasi dapat meningkatkan mutu layanan kesehatan. Melalui pemahaman ini, kita dapat mengarahkan upaya menuju sistem kesehatan yang lebih berkualitas, sesuai dengan tujuan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih atas dukungan, inspirasi dan bantuan kepada semua pihak dalam membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini, termasuk pada peserta yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti, F., & Arofi, S. P. (2021). Studi Mutu (ServQual) dan Kepuasan Pasien Berdasarkan Akreditasi Puskesmas. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 10(03), Article 03. <https://doi.org/10.33221/jikm.v10i03.509>

- Aswar, M. (2019). *PERAN PERAWAT DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI PUSKESMAS UNTUK PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN MOROWALI* [Other, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG]. <http://repository.unika.ac.id/19806/>
- Batubara, S., Napitupulu, L. R., Kasim, F., Manalu, E. D., & Jauhari, W. (2019). HUBUNGAN STATUS AKREDITASI PUSKESMAS DENGAN MUTU PELAYANAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN. *Wahana Inovasi : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 8(1), Article 1. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/1440>
- Daeyani, R. (2018). *KEBERLANJUTAN IMPLEMENTASI PROGRAM AKREDITASI PUSKESMAS PASCA TERAKREDITASI DI KABUPATEN LUMAJANG* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/163120?msclid=edb58d11c47b11ec9d5f>
- Ensha, I. S. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas terhadap Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mewujudkan Produktivitas Kerja. *Jurnal Publik : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 12(01), Article 01. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/283>
- Eviheryanto, E., & Syakurah, R. A. (2023). Workshop Instrumen Akreditasi Puskesmas Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v5i1.1098>
- Gultom, J. E., & Nyorong, M. (2021). Pengaruh Persepsi Pasien Tentang Akreditasi Puskesmas Terhadap Kepuasan Pasien Di Puskesmas Siatas Barita. *Journal of Borneo Holistic Health*, 4(2), 119-122.
- Hidayat, A. W., Setianingsih, L. E., & Hutagaol, E. K. (2023). Workshop Persiapan Akreditasi Di Klinik Pratama Mitra Sehat KD. Waringin Tahun 2022. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i3.5590>
- Lailatul Maghiroh, -, & Thinni Nurul Rochmah, -. (2017). ANALISIS KESIAPAN PUSKESMAS DEMANGAN KOTA MADIUN DALAM MENGHADAPI AKREDITASI. *JURNAL MKMI*, 13(4), Article 4. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/mkmi/index>
- Darajatun, R. H., Nurdin, N., & Kesumah, N. (2023). Pengaruh Status Akreditasi Puskesmas terhadap Indeks Kepuasan Pasien di Puskesmas. *Jurnal Sosial dan Sains*, 3(4), 375-381.
- Mawarni, D., Sabran, S., Puspitasari, S. T., & Wardani, I. M. K. (2022). GAMBARAN AKREDITASI PUSKESMAS INDONESIA BERDASARKAN DATA SEKUNDER DARI RISET FASILITAS KESEHATAN 2019. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.19184/ikesma.v18i1.26551>
- Ningrum, E. N., & Wati, E. (2020). HUBUNGAN AKREDITASI PUSKESMAS DENGAN KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS KABUPATEN BANYUMAS. *Human Care Journal*, 5(3), 732-741. <https://doi.org/10.32883/hcj.v5i3.755>
- Nugroho, A. P., Ardani, I., & Effendi, D. E. (2023). Dampak Kebijakan Akreditasi Puskesmas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v14i1.3039>
- RINGRIH, I. A. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKREDITASI PUSKESMAS DI KOTA MAKASSAR = IMPLEMENTATION OF PUBLIC HEALTH CENTER ACCREDITATION POLICY IN MAKASSAR CITY - Repository Universitas Hasanuddin*. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16863/#>
- Septiani, F., Batara, A. S., & Patimah, S. (2021). Analisis Kesiapan Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar dalam Implementasi Akreditasi Puskesmas Tahun 2019. *Window of Public Health Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.33096/woph.v2i1.129>

- Simanjuntak, E., & Insani, F. (2021). Tinjauan Sistem Penyelenggaraan Rekam Medis Menurut Standart Akreditasi Puskesmas di Puskesmas Pangakalan Berandan Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.52943/jipiki.v6i2.587>
- Stevani, Y. (2019). Proses Persiapan Akreditasi Puskesmas Kertek II. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/higeia.v3i1.24881>
- Suryani, A., Chotimah, I., & Hidana, R. (2019). Analisis Proses Akreditasi Puskesmas Sindang Barang Kota Bogor Tahun 2018. *PROMOTOR*, 2(2), 87-100.
- Sutanti, D., Suparman, R., Setianingsih, T., & Badriah, D. L. (2022). STUDI ANALISIS KETERCAPAIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKREDITASI PUSKESMAS DAN KINERJA PUSKESMAS DI KABUPATEN KUNINGAN. *Journal of Public Health Innovation*, 2(02), 189–198. <https://doi.org/10.34305/jphi.v2i02.462>
- Syukriadi, S. (2022). UPAYA MENINGKATKAN CAPAIAN AKREDITASI PUSKESMAS DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.31596/jkm.v10i1.1015>
- Tawalujan, T. W., Korompis, G. E. C., & Maramis, F. R. R. (2018). HUBUNGAN ANTARA STATUS AKREDITASI PUSKESMAS DENGAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN DI KOTA MANADO. *KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*, 7(5), Article 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/kesmas/article/view/22336>
- Trisna, I. N. P., & Raharjo, B. B. (2019). Status Akreditasi Puskesmas dengan Tingkat Kepuasan Pasien. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/higeia.v3i2.27138>
- Tulenan, R. G., Kolibu, F. K., & Maramis, F. R. R. (2023). HUBUNGAN ANTARA STATUS AKREDITASI DENGAN KEPUASAN PASIEN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAKAS DAN KAKAS BARAT KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i4.20037>
- Utami, S. N., & Lubis, S. (2021). EFEKTIVITAS AKREDITASI PUSKESMAS TERHADAP KUALITAS PUSKESMAS MEDAN HELVETIA. *PUBLIK REFORM: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.46576/jpr.v8i2.1658>
- Valentina, V. (2019). Tinjauan Sistem Penyimpanan Rekam Medis Menurut Standar Akreditasi Puskesmas Di Puskesmas Sukaramai Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda*, 4(1), 554–559. <https://www.neliti.com/publications/299216/>
- Wulandari, R. D., Ridho, I. A., Supriyanto, S., Qomarrudin, M. B., Damayanti, N. A., Laksono, A. D., & Rassa, A. N. F. (2019). *Pengaruh Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas terhadap Kepuasan Pasien*. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3906>
- Yewen, M. R., Korompis, G. E. C., & Kolibu, F. K. (2018). HUBUNGAN ANTARA STATUS AKREDITASI PUSKESMAS DENGAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT. *KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*, 7(5), Article 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/kesmas/article/view/22142>